BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek yang dijadikan penelitian didalam penulisan skripsi ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat. Berikut adalah sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi dan deskripsi tugas yang penulis peroleh langsung dari tempat yang penulis teliti.

3.1.1. Sejarah Singkat Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di Jalan Perkantoran III Komplek Perkantoran Sendawar, Kutai Barat ini dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2001 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan diundangkan di Sendawar pada tanggal 8 Juli 2001 oleh Bupati Kutai Barat, Rama Alexander Asia. Kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2006 tentang penambahan dan perubahan atas susunan organisasi yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2006 oleh Bupati Kutai Barat, Rama Alexander Asia di Sendawar.

Adanya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat sebagai sebagai implementasi dari Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 60 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka

peningkatan pelaksanaan pelayanan umum dan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pemerintah Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah baik dalam bentuk Dinas Daerah, Badan dan atau Kantor sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Kabupaten yang mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlunya Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pendapatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dinas – Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, ditata dan dibentuk berdasarkan Prinsip Penataan Dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

1. Penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih,
2. Didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan,
3. Ramping struktur kaya fungsi,
4. Mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional,

5. Memperhatikan aspek Personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan prinsip,
6. Efisiensi, efektivitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah. Dengan demikian maka pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah serta tersedianya Sumber Daya Aparatur.

3.1.2. Visi dan Misi Organisasi

Visi dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat adalah terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat.

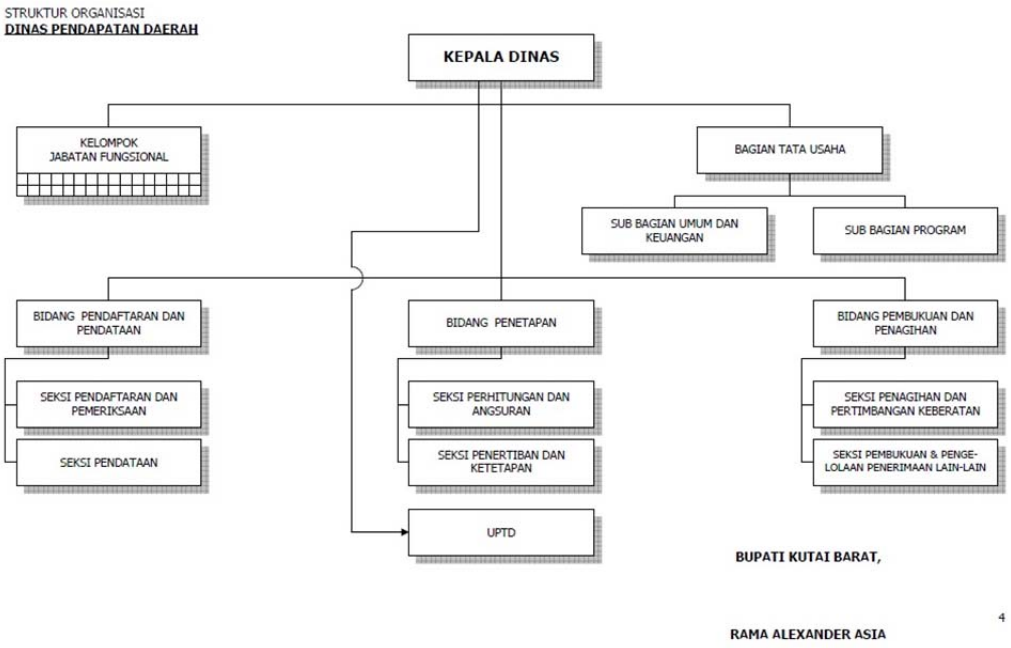
Sedangkan misi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat yaitu :

1. Mengamankan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak / bukan pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas pendapatan daerah maupun yang dilaksanakan oleh dinas/instansi/pengelola penerimaan lainnya,
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia,

3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan,
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan,
5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

3.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Kutai Barat.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Kutai Barat

3.1.4. Deskripsi Tugas

A. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang pendaftaran dan pendataan dibawahi langsung oleh seorang Kepala Dinas dan mengelola aktivitas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pendataan berdasarkan data dan program Bidang Pajak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja,
2. Melaksanakan kegiatan penelitian, menghimpun dan mencatat data objek dan subjek pajak daerah,
3. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak,
4. Melakukan pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan surat dari Dinas/Instansi terkait,
5. Melakukan pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan surat dari Dinas/Instansi terkait,
6. Membuat laporan inventaris data potensi wajib pajak,
7. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak,
8. Mengeluarkan surat pengukuhan sebagai wajib pajak.

Bidang pendaftaran dan pendataan dalam menjalankan tugasnya, membawahi Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan serta Seksi Pendataan.

B. Bidang Penetapan

Bidang penetapan merupakan unit yang dibawahi langsung oleh seorang Kepala Dinas. Bidang Penetapan juga diberi tugas dalam mengelola beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang penetapan pendapatan daerah,
2. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan daerah,
3. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah,
4. Pelaksanaan penetapan pajak daerah,
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penetapan,
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dideskripsikan di atas, Bidang Penetapan terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Perhitungan dan Angsuran serta Seksi Penertiban dan Ketetapan.

C. Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang penetapan merupakan unit yang dibawahi langsung oleh seorang Kepala Dinas. Bidang Penetapan juga diberi tugas dalam mengelola beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penagihan pajak daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo secara aktif dan pasif,

2. Melaksanakan penagihan – penagihan pajak daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo secara aktif dan pasif,
3. Melaksanakan pembukuan dan verifikasi mengenai realisasi penerimaan dan piutang pajak daerah,
4. Melaksanakan pembukuan piutang pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dideskripsikan di atas, Bidang Pembukuan dan Penagihan terdiri dari dua seksi yaitu Seksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan serta Seksi Pembukuan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain.

3.2 Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mengarah pada hasil penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan mengolah berbagai informasi tentang perpajakan dan retribusi daerah dan jenis pajak atau retribusi yang ada di Kabupaten Kutai Barat yang dikelola melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

3.2.1. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan adalah *metode deskriptif* yaitu metode yang hanya menggambarkan dan meringkaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai variable. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui metode pengumpulan data observasi, di mana metode tersebut dapat membuat gambaran objek yang diteliti secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat pada suatu objek penelitian tertentu, penulis mengolah dan membahas pemasalahan yang timbul dan pada akhirnya dapat dibuat suatu kesimpulan yang dapat memperbaiki permasalahan yang ada dan dibuat suatu laporan penelitian ini.

Penelitian metode deskriptif mempunyai langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif,
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas,
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian,
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan,
5. Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian,
6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen, mengumpulkan data, dan menganalisis data,
7. Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan,
8. Membuat laporan penelitian.

3.2.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

3.2.2.1. Sumber Data Primer

Merupakan pengumpulan data yang berasal dari objek atau sumber yang di teliti secara langsung, cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap proses pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah serta jenis-jenis pajak dan retribusi yang dikelola pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sampai kepada output yang dihasilkan, dengan menganalisis sistem dan mekanisme pengolahan yang sedang berjalan pada organisasi / instansi tersebut. Adapun penulis melakukan penelitian pada bidang penetapan untuk mengetahui tentang aktivitas pengolahan data wajib pajak dan jenis pajak / retribusi daerah yang dikelola serta untuk mengetahui lebih detail tentang sistem dan mekanisme yang sedang berjalan pada bidang penetapan.

3.2.2.2. Sumber Data Sekunder (Dokumentasi)

Dalam data sekunder, data tersebut berupa data yang sudah diolah lebih lanjut oleh pengumpul data tersebut, seperti sumber-sumber referensi, baik dari buku sumber ataupun dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak terkait pada saat penelitian dilakukan, seperti nota perhitungan pajak dan retribusi, nota perhitungan retribusi daerah serta daftar jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat.

3.2.3. Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan sistem dapat dikatakan sebagai langkah awal yang dibuat sebelum melakukan pada metode pengembangan sistem. Itu terlihat dari setiap permasalahan yang ditemukan pada sistem informasi yang ada, untuk dipecahkan dan menjadikan langkah-langkah pengembangan menjadi sistem informasi yang baru. Dari pendekatan sistem dapat dilakukan pengembangan

sistem untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan terstruktur. Tujuannya adalah supaya pada akhir pengembangan sistem akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas.

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

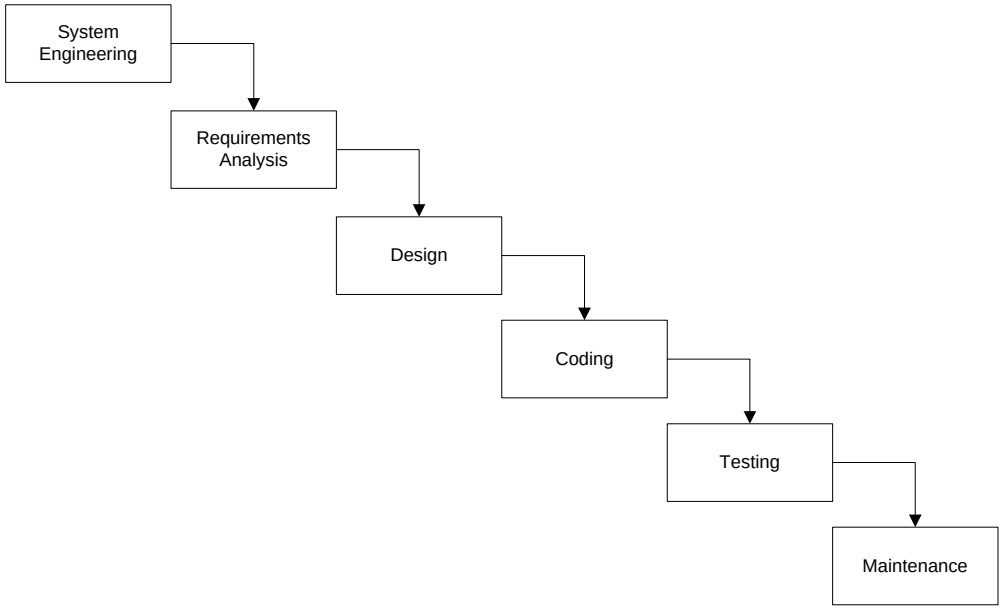
Metode pengembangan sistem yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan sistem waterfall. Menurut Jogiyanto H.M (2004:59) dalam bukunya Analisis & Desain. Menjelaskan bahwa :

“Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang akan digunakan untuk menembangkan suatu system informasi”

Pengembangan sistem didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis computer untuk menyelesaikan persoalan (problem) organisasi atau memanfaatkan kesempatan (oppportunities) yang timbul.

Model air terjun (waterfall) biasa juga disebut siklus hidup perangkat lunak. Mengambil kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi dan mempresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti

spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian dan seterusnya.



Gambar 3.2 Metode *Waterfall*
(Sumber: Jogiyanto, H.M., Analisis dan Desain Sistem Informasi, 2004:59, Informatika)

Keterangan Menurut gambar diatas alur dari Model *Waterfall* sebagai berikut:

1. Rekayasa perangkat lunak (*system enginerring*),melakukan pengumpulan data dan penetapan kebutuhan semua elemen sistem,
2. *Requirements analysis* , melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dan menetapkan kebutuhan perangkat lunak, fungsi performsi dan interfacing,
3. Design, menetapkan domain informasi untuk perangkat lunak,fungi dan interfacing,

4. Coding (imolementasi), pengkodean yang mengimplementasikan hasil desain ke dalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin komputer dengan menggunakan bahasa pemprograman tertentu,

5. Testing (pengujian) , kegiatan untuk melakukan pengetesan program yang sudah dibuat apakah udah benar atau belum di uji dengan cara manual.jika testing sudah benar maka program boleh digunakan,

6. Maintenance (perawatan) , menangani perangkat lunak yang sudah selesai supaya dapat berjalan lancar dan terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan.

Berikut adalah tahapan-tahapan penulis dalam merancang sebuah sistem yang menggunakan mekanisme pengembangan sistem dengan *waterfall*, antara lain :

1. Penulis akan mengidentifikasi kebutuhan User, supaya penulis bisa merancang system yang akan dibangun sesuai dengan yang diharapkan User. Sebelum pada tahap perancangan, penulis mengnalisis sistem dengan cara melakukan pengumpulan data yaitu dengan fielf recerch (metode penelitian)/ observasi, dan interview (wawancara) dan dengan cara literature yaitu dengan dokumentasi terhadap kebutuhan yang diinginkan pemakai.

2. Pada tahap kedua, penulis membuat prototype sistem tersebut untuk memperlihatkan kepada pemakai model sistem yang akan dirancang.

3. Pada tahap ketiga, penulis menerjemahkan desain prototype ke bentuk code(perangkat lunak) dari hasil perancangan dan analisis yang bisa dibaca oleh perangkat keras.

4. Pada tahap keempat, penulis melakukan uji coba sistem yang telah dirancang untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat digunakan dengan baik dan benar, sesuai kebutuhan pemakai.

5. Pada tahap kelima, penulis akan mementukan apakah sistem tersebut dapat diterima oleh pemakai, atau harus dilakukan beberapa perbaikan atau bahkan dibongkar semuanya dan mulai dari awal lagi, serta setelah perbaikan sistem itu selesai dikerjakan,penulis akan kembali lagi pada tahap ketiga yaitu melakukan pengujian prototype kembali.

6. Pada tahap keenam, penulis menjaga perangkat lunak dari kerusakan dan melakukan perubahan (*update*) untuk terus mengembangkan perangkat lunak yang telah ada.

3.2.3.3 Alat Bantu Analisis dan Perancangan

a. Analisis

Analisis adalah mempelajari masalah – masalah yang timbul dan kemudian memperbaiki berbagai fungsi yang ada di dalam sistem berjalan agar lebih menjadi efektif dan efesien.

b. Perancangan

Perancangan adalah menentukan bentuk dari sistem yang akan di buat yang sesuai kebutuhan pemakai yang telah di analisis terlebih dahulu, termasuk di dalamnya input dan output sistem.

1. Flow Map

“Flowmap adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan uruturutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Flowmap biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.

2. Diagram Konteks

“Diagram Konteks adalah diagram yang menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau dengan kata lain diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum/global dari keseluruhan sistem yang ada. Berdasarkan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa diagram konteks merupakan diagram yang menggambarkan sistem secara umum atau global.

3. DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. Data Flow Diagram juga

digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Data Flow Diagram adalah diagram untuk menggambarkan arus dari data sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya.

a. DFD Level 0/Zero (Overview Diagram)

Dari context diagram ini kemudian akan digambar dengan lebih rinci lagi disebut level 0 (overview diagram).

b. Diagram Rinci/Detail (Level Diagram)

Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram zero atau diagram level diatasnya. Berdasarkan definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa diagram rinci merupakan diagram yang menjelaskan atau menguraikan proses secara lebih detail lagi dari dari proses yang ada di level 0.

4. Kamus Data

Kamus Data merupakan katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. dalam kamus data harus memuat hal-hal berikut:

1. Nama Arus Data

Nama arus data dicatat pada kamus data, sehingga mereka yang membaca DAD memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang suatu arus data tertentu.

2. Alias

Untuk menyatakan nama lain dari element atau data store yang sebenarnya sama dengan data element atau data store yang telah ada.

3. Bentuk Data

Dipergunakan untuk mengelompokan kamus data ke dalam kegunaannya sewaktu perancangan sistem.

4. Arus Data

Menunjukan dari mana data mengalir dan kemana data akan menuju,keterangan arus data ini perluh dicatat di kamus data supaya memudakan mencari arus data ini di DFD.

5. Penjelasan

Untuk lebih memperjelas lagi tentang makna dari arus data yang dicatat di kamus data. Maka bagian penjelasan dapat diisi dengan keterangan - keterangan tentang arus data tersebut.

6. Periode

Menunjukkan kapan terjadinya arus data ini. periode perlu dicatat di kamus data karenah dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan input data harus dimasukkan ke sistem, kapan proses program harus dilakukan dan kapan laporan – laporan dihasilkan.

7. Volume

Volume rata-rata menunjukkan banyaknya rata-rata arus data yang mengalir dalam satu periode tertentu dan volume puncak menunjukkan volume yang terbanyak.

8. Struktur data

Struktur data menunjukan harus data yang dicatat di kamus data terdiri dari item - item data apa saja. Berdasarkan dari kedua definisi di atas maka

penulis menyimpulkan bahwa kamus data merupakan suatu bantuan yang berguna untuk kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi.

5. Perancangan Basis Data

1. Normalisasi

Proses normalisasi mempunyai pengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Proses normalisasi selalu diuji pada beberapa kondisi, yaitu kemungkinan ada kesulitan pada saat menambah, menghapus, mengubah, membaca pada suatu database. Bila ada kesulitan pada pengujian tersebut relasi dapat dipecahkan pada beberapa tabel lagi atau dengan kata lain perancangan belumlah mendapatkan database optimal. Pada proses normalisasi ini perlu dikenal terlebih dahulu mengenai definisi dari tahap-tahap normalisasi. Tahap-tahap normalisasi terdiri dari :

a. Bentuk tidak normal (Unnnormalized Form)

Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, bisa saja data tidak lengkap atau terduplikasi.

b. Bentuk normal ke satu (1NF /First Normal Form)

Bentuk normal ke satu mempunyai ciri-ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file (file datar/rata), data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field-field berupa atomic value.

c. Bentuk normal ke dua (2NF /Second Normal Form)

Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke satu. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara

fungsi pada kunci utama/ primary key sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field haruslah unik dan dapat mewakili atribut lainnya yang menjadi anggotanya.

d. Bentuk normal ketiga (3NF / Third Normal Form)

Untuk menjadi bentuk normal ketiga maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribute bukan primer tidak punya hubungan yang transitif. Dengan kata lain, setiap atribut bukan kunci haruslah bergantung hanya pada primary key dan pada primary key secara menyeluruh.

e. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)

Boyce-Codd Normal Form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BCNF, relasi harus dalam bentuk normal kesatu dan setiap atribut harus bergantung fungsi pada atribute superkey.

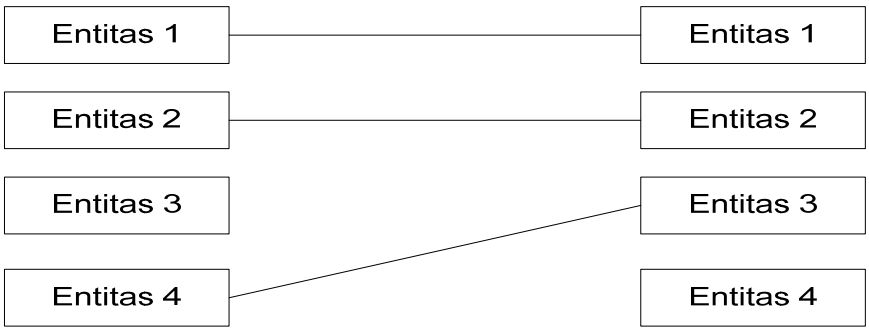
2. Tabel Relasi

Menurut Jogiyanto H.M (2004:15) dalam buku Analisis dan Desain, menjelaskan bahwa:

“Kardinalitas Relasi menunjukkan jumlah maksimum tupel yang dapat berelasi dengan entitas pada entitas yang lain.sebagai berikut:

1. Relasi Satu ke satu (*One-to-One*)

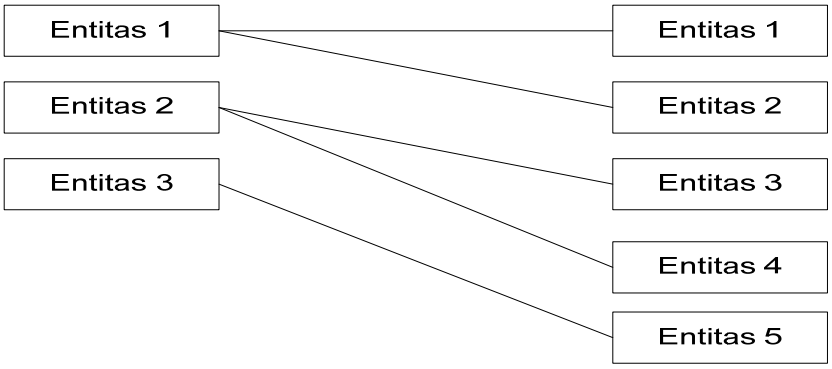
Tingkat hubungan ini menunjukkan hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama, dan hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya.



Gambar 3.3 relasi *One to one*

2. Relasi Satu ke Banyak atau Banyak ke Satu (*On-to-Many* atau *Many-to-One*)

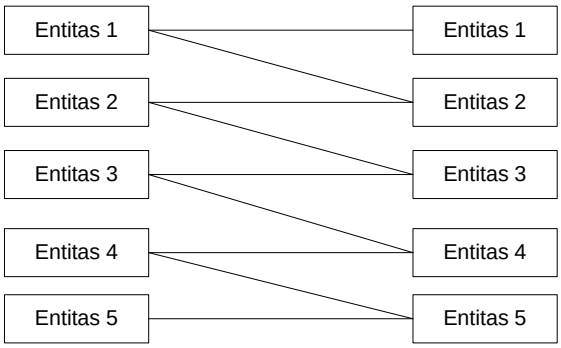
Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu, tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang kedua. Sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang kedua hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang pertama.



Gambar 3.4 Relasi *One toMany*

3. Relasi Banyak-ke-Banyak (*Many to Many*)

Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya, dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi yang kedua.



Gambar 3.5 Relasi *Many to Many*

4. Kunci Elemen Data (Key)

Menurut Jogiyanto H.M (2004:15) dalam buku Analisis dan Desain, menjelaskan bahwa terdapat bermacam-macam jenis Key, antara lain:

1 Super Key, salah satu atau lebih atribut (kumpulan atribut) dari suatu tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi entity/record dari tabel tersebut secara unik (tidak semua atribut dapat menjadi super key).

2 Candidate Key, tidak boleh berisi atribut dari tabel yang lain sehingga candidate key sudah pasti super key namun belum tentu sebaliknya

3 Primary Key, salah satu atribut candidate key dapat dipilih menjadi primary key dengan 3 (tiga) kriteria yaitu key tersebut lebih natural untuk digunakan sebagai acuan, lebih sederhana, terjamin keunikannya.

4 Alternate key, setiap atribut candidate key yang tidak terpilih menjadi primary key maka atribut-atribut tersebut dinamakan alternate key..

3.2.4. Pengujian Software

Metode pengujiaan yang digunakan dalam pengujiaan perangkat lunak disini adalah metode *Black Box Testing.* Pendekatan ini melakukan pengujian

terhadap fungsi operasional *software.* Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh penguji yang tidak ikut serta dalam pengkodean *software.*

Metode *Black Box Testing,* merupakan pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar atau tidak. Pengujian *black box* merupakan perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dijalankan, dieksekusi pada perangkat lunak,dan kemudian hasil dari perangkat lunak akan dicek, sesuai tidaknya dengan apa yang diharapkan.

3.3 Analisis Sistem Yang Berjalan

Analisis terhadap sistem yang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah apa sedang yang dihadapi sistem untuk dapat dijadikan usulan perancangan sistem. Analisis yang berjalan dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada dan fungsi pada sub bagian, dari urutan tersebut dapat dibuat diagram alir dokumen *(flowmap),* diagram konteks *(context diagram),* maupun diagram alir data *(data flow diagram).*

3.3.1 Analisis Dokumen

Analisis dokumen yang sedang berjalan ini akan menguraikan secara rinci dokumen-dokumen yang digunakan pada pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat, diantaranya :

1. Dokumen Uraian Pengajuan Pajak dan Retribusi Daerah

Nama : Uraian Pengajuan Pajak dan Retribusi Daerah

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi uraian dan spesifikasi pengajuan pajak dan retribusi yang diajukan wajib pajak dan retribusi

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Pendaftaran dan Pendataan / Seksi Pendaftaran dan Pemeriksaan / Seksi Pendataan

Atribut : Nomor Pengajuan, NPWPRD, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Penandatangan, Tanggal

2. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Reklame Baru

Nama : Nota Perhitungan Pajak Reklame Baru

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak reklame baru yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

3. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Reklame Perpanjangan

Nama : Nota Perhitungan Pajak Reklame Perpanjangan

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak reklame yang diperpanjang oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

4. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Baliho (Rokok)

Nama : Nota Perhitungan Pajak Baliho (Rokok)

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak baliho (rokok) yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai,

Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

5. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Baliho Biasa

Nama : Nota Perhitungan Pajak Baliho Biasa

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak baliho yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

6. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Hotel

Nama : Nota Perhitungan Pajak Hotel

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak hotel yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

7. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Restoran (Catering)

Nama : Nota Perhitungan Pajak Restoran (Catering)

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak restoran (catering) yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, No. Reg. NP, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

8. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Restoran (Rumah Makan)

Nama : Nota Perhitungan Pajak Restoran (Rumah Makan)

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak rumah makan yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

9. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

Nama : Nota Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

10. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Nama : Nota Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak usaha sarang walet yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPD, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Nilai, Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

11. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Hiburan

Nama : Nota Perhitungan Pajak Hiburan

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak hiburan yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, Nomor SPTPD/SPTRD Yang Dikirim, NPWPD, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening,

Dasar Pengenaan (uraian), Tarif, Ketetapan, Sanksi, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

12. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Penerangan Jalan (Non PLN)

Nama : Nota Perhitungan Pajak Penerangan Jalan (Non PLN)

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak penerangan jalan yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPD, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Tarif, Ketetapan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

13. Dokumen Nota Perhitungan Pajak Air Tanah

Nama : Nota Perhitungan Pajak Air Tanah

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis pajak air tanah yang dibayar oleh wajib pajak

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPD, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

14. Dokumen Nota Perhitungan Retribusi Izin Gangguan (HO) Baru

Nama : Nota Perhitungan Retribusi Izin Gangguan (HO) Baru

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis retribusi izin gangguan yang dibayar oleh wajib retribusi

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

15. Dokumen Nota Perhitungan Retribusi Izin Gangguan (HO) Perpanjangan

Nama : Nota Perhitungan Retribusi Izin Gangguan (HO) Perpanjangan

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis retribusi perpanjangan izin gangguan yang dibayar oleh wajib retribusi

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Perhitungan, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

16. Dokumen Nota Perhitungan Retribusi IMB Masyarakat

Nama : Nota Perhitungan Retribusi IMB Masyarakat

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis retribusi daerah untuk IMB bagi masyarakat yang dibayar oleh wajib retribusi

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, NPWPRD, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Perhitungan, Tarif, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

17. Dokumen Nota Perhitungan Retribusi IMB Proyek

Nama : Nota Perhitungan Retribusi IMB Proyek

Fungsi : Merupakan dokumen yang berisi informasi data perhitungan jenis retribusi daerah untuk IMB proyek yang dibayar oleh wajib retribusi

Rangkap : 1(satu) berkas

Sumber : Bidang Penetapan / Seksi Administrasi Perhitungan dan Angsuran

Atribut : Nomor Nota Perhitungan, No. Reg, Tahun, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Jenis Pajak / Retribusi, Kode Rekening, Dasar Pengenaan (uraian), Perhitungan, Nilai, Tarif, Total Pajak, Penandatangan, Tanggal dan Pembuat Nota

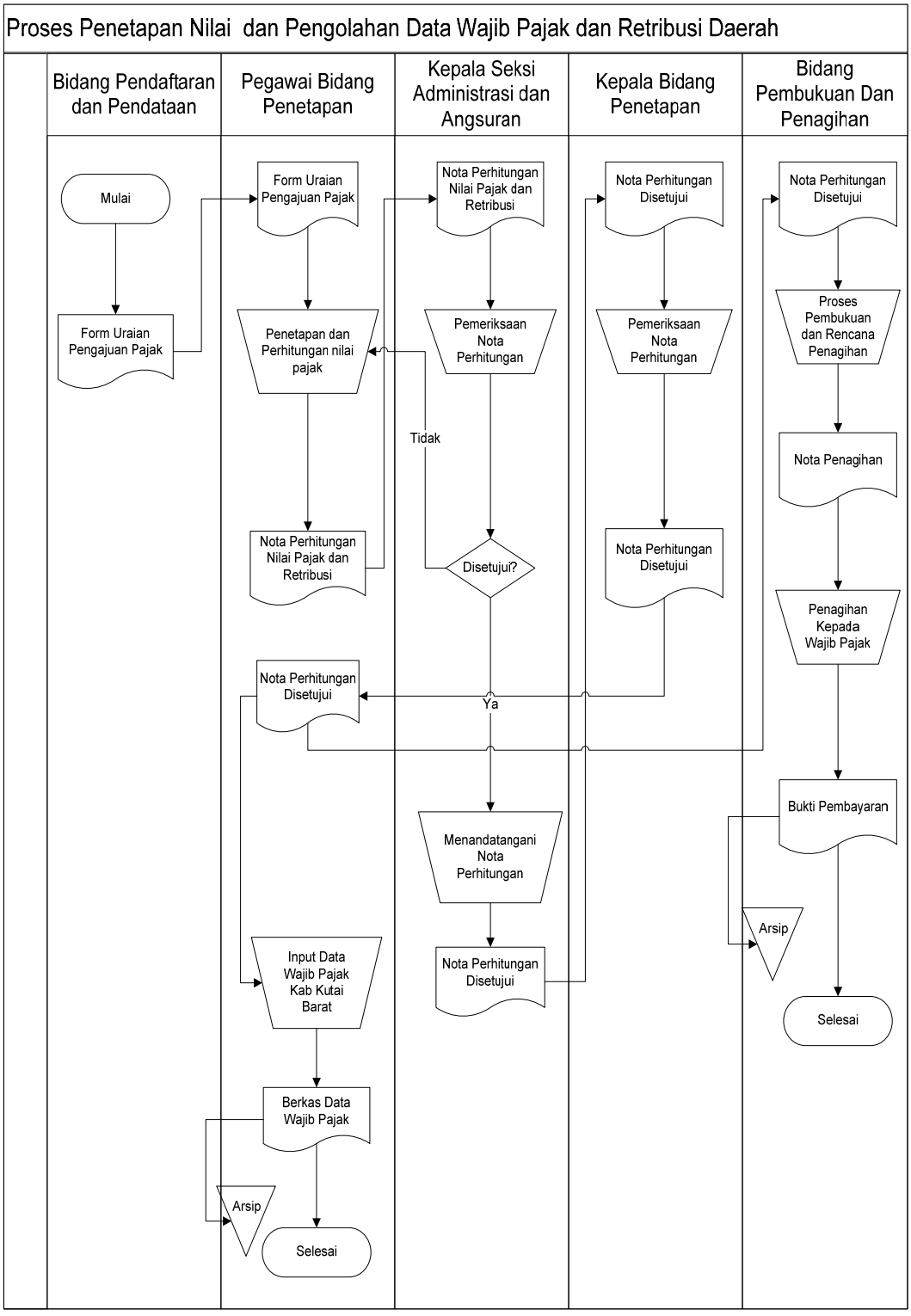
3.3.2 Analisis Prosedur Yang Berjalan

Analisis prosedur merupakan kegiatan menganalisis prosedur-prosedur kerja yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Adapun hasil dari kegiatan analisis ini berupa gambaran nyata dari urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data.

Prosedur yang sedang berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah seperti berikut :

3.3.2.1. Flow Map

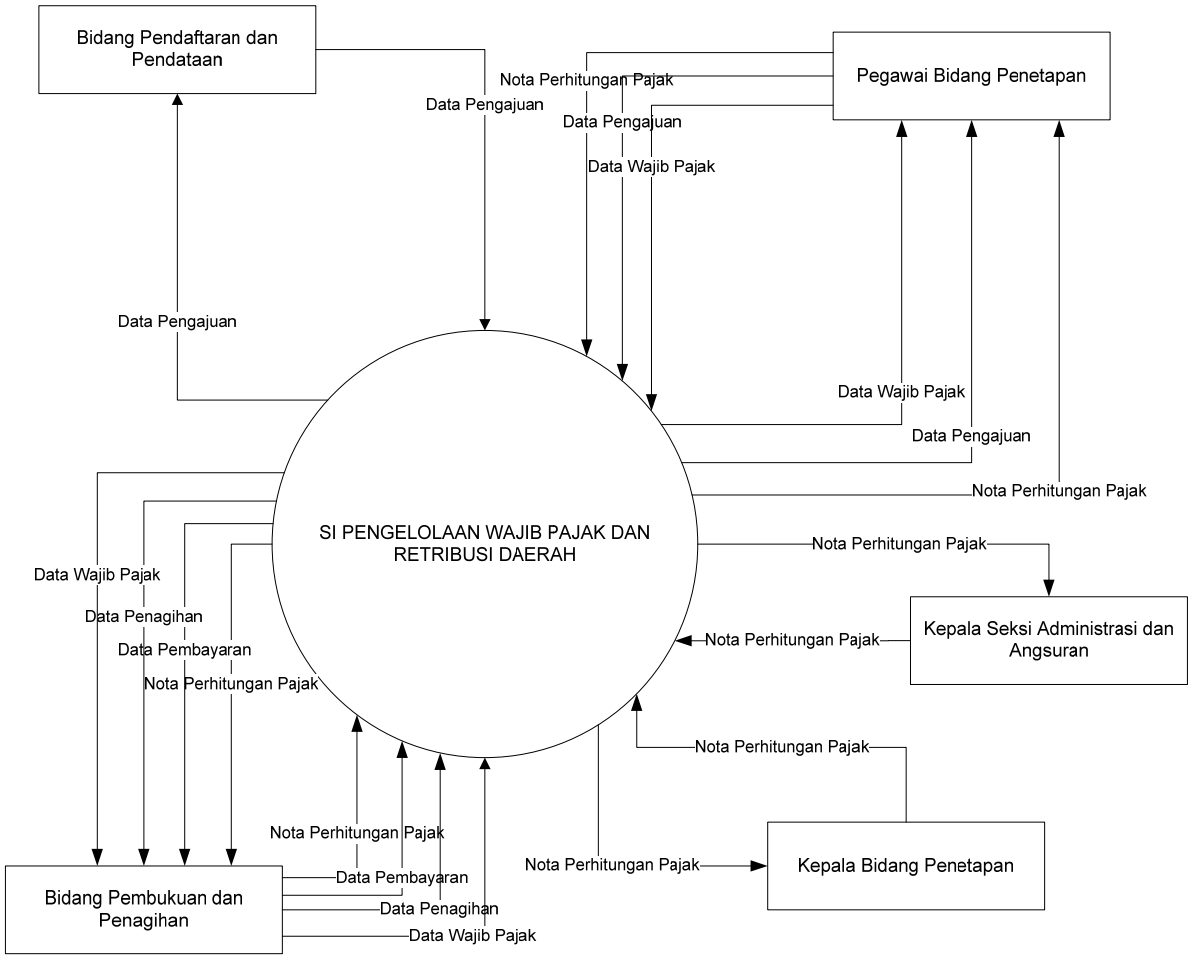
Flowmap prosedur penetapan nilai pajak serta pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat yang sedang berjalan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.6 Flow Map Pengolahan Data Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat

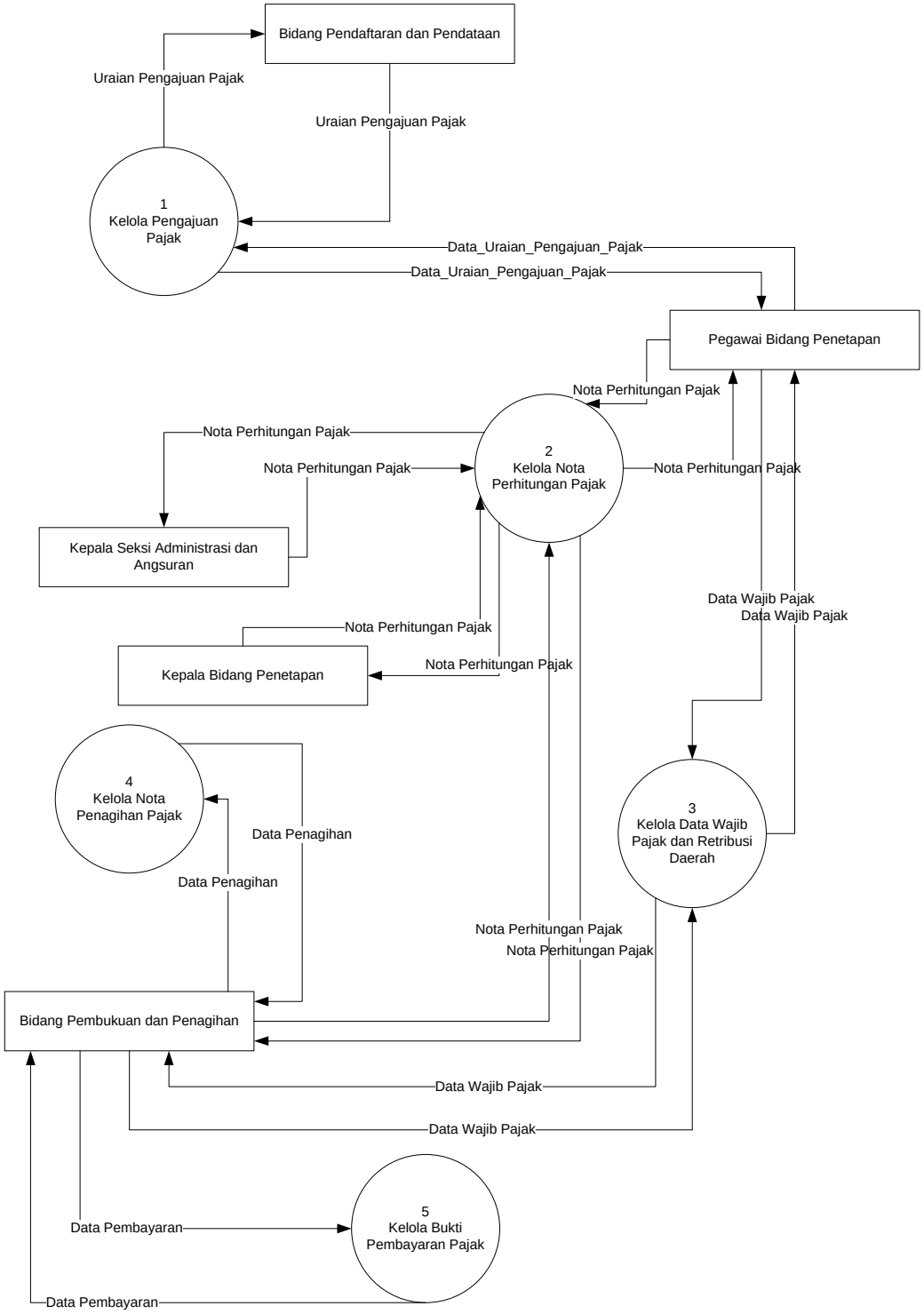
3.3.2.2. Diagram Konteks

Diagram kontek adalah model yang menggambarkan hubungan dengan lingkungan luar.Diagram konteks berfungsi untuk menggambarkan suatu sistem yang sedang berjalan secara keseluruhan, awal dan akhir dari data yang masuk dan keluar pada sistem tersebut. Adapun diagram konteks penetapan nilai pajak serta pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat yang sedang berjalan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.7 Diagram Konteks proses pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat yang sedang berjalan

3.3.2.3. Data Flow Diagram



Gambar 3.8 *Flow Diagram* Level 1 pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat yang sedang berjalan

3.3.3 Evaluasi Sistem Yang Berjalan

Setelah melakukan analisis terhadap penetapan nilai pajak serta pengolahan data wajib pajak dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kutai Barat yang sedang berjalan, penulis bisa menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang ada pada sistem tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan dari Sistem pemenuhan kebutuhan karyawan tenaga kontrak kerja yang sedang bejalan yang sedang berjalan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Evaluasi system yang sedang berjalan

No	Masalah	Entitas	Solusi
1	1. Proses pengelolaan data wajib pajak dan retribusi daerah yang jumlahnya tidak sedikit, masih dibuat secara manual dengan menggunakan *spreedsheet* sederhana sehingga dianggap tidak efisien waktu dan menghasilkan arsip dalam bentuk konvensional (kertas) yang membutuhkan ruang lebih	Bidang Penetapan	Perlunya dibuat aplikasi sistem terkomputerisasi yang dapat meminimalisasi output yang berbentuk kertas.

	untuk menyimpannya serta rentan mengalami kerusakan arsip.		
2	2. Penyimpanan data arsip pencatatan wajib pajak dan retribusi daerah dalam bentuk *soft copy*, belum didukung oleh media penyimpanan berupa basis data.	Bidang Penetapan.	Perlunya dibangun aplikasi yang didukung dengan media penyimpanan berupa basis data sehingga dapat dijadikan sebagai media menyimpan data yang diolah.
3	3. Terjadi kesulitan dalam mengakses dan mencari data arsip yang berdasarkan kurun waktu tertentu saat terjadi perubahan data, dikarenakan data harus dicari secara manual satu per satu.	Bidang Penetapan.	Perlunya dibangun aplikasi sistem informasi terkomputerisasi yang memudahkan *user* yang melakukan proses kelola dapat, mudah dalam mengakses data jika terjadi perubahan data.